



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI HANTO
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN
3. NHK : 836676

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 695.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 55 m2/70 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 1.050 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/80 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 1.060 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 623 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. Tanah Seluas 2.330 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 417.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI DTRACKER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 37.500.000
4. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000



5. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
164.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	178.309.149
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.290.809.149
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.290.809.149

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.